

**PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA MALANG**

SKRIPSI



Oleh:

**AHMAD HELMY SULAIMAN
NIM :17520082**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA MALANG**

SKRIPSI

Di usulkan untuk penelitian skripsi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

AHMAD HELMY SULAIMAN

NIM : 17520082

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA MALANG

SKRIPSI

O l e h

AHMAD HELMY SULAIMAN

NIM : 17520082

Telah Disetujui Pada Tanggal 12 Maret 2023

Dosen Pembimbing,



Isnan Murdiansyah, M.S.A

NIP. 198607212019031008

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA MALANG

SKRIPSI

Oleh

AHMAD HELMY SULAIMAN

NIM : 17520082

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 17 Maret 2023

Susunan Dewan Penguji:

1 Penguji Utama

Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A

NIP. 197710252009012006

2 Ketua Penguji

Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.S.A

NIP. 19751030201608012048

3 Sekretaris Penguji

Isnan Murdiansyah, M.S.A

NIP. 198607212019031008

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Helmy Sulaiman

NIM : 17520082

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA MALANG adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya pihak lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 Maret 2023

Hormat saya.



Ahmad Helmy Sulaiman

NIM : 17520082

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan penyelesaian penelitian ini dengan rahmat dan petunjuk-Nya dengan judul -PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA MALANGI.

Sholawat serta salam saya ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memimpin kami dari zaman kegelapan menuju jalan kebaikan. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan kontribusi dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D., selaku ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Isnan Murdiansyah M.S.A sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh dosen yang mengajar di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selalu membagi keahliannya.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, adik-adik, dan orang-orang tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril dan spiritual.
7. Kepada seluruh pegawai BKAD Kota Malang, yang membantu dalam pengisian kuisioner skripsi dengan baik.
8. Saya mengucapkan terima kasih atas ketekunan diri sendiri dalam menyelesaikan proyek akhir ini.

Dengan menyadari dengan penuh kerendahan hati bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengantisipasi menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan. dan juga berharap dapat bermanfaat bagi semua pihak

Malang, 17 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
BAB II	18
KAJIAN PUSTAKA	18
2.1 Hasil – hasil penelitian Terdahulu	18
2.2 Landasan Teori.....	19
2.3 Penyajian Laporan Keuangan Daerah	21
2.4 Aksibilitas laporan keuangan daerah.....	26
2.5 Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah.....	27
2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis	28
2.7 Hipotesis.....	29
2.7.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	29
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Populasi dan Sampel	36
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	37
3.5 Data dan Jenis Data.....	38

3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Definisi Operasional	38
3.8 Metode Pengumpulan Data	39
3.9 Analisis Data	39
3.9.1 Analisis Deskriptif	39
3.9.2 Uji Kasualitas Data	39
3.10 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	40
3.11 Pengujian Hipotesis.....	41
BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Hasil Analisis Deskriptif	46
4.2 Hasil Analisis Uji Kausalitas Data	47
4.3 Hasil Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	48
1.3 Pembahasan	55
4.1.4 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan (A) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang (AK)	55
4.2.4 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan (P) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang (AK)	56
4.3.4 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan (A) dan Penyajian Laporan Keuangan (P) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang (AK)	56
BAB V.....	58
PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Definisi Operasional.....	38
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	46
Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas.....	47
Tabel 4. 3 Hasil Uji Reabilitas	48
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas	50
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	51
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hipotesis	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	28
Gambar 4. 1 Data olahan <i>evIEWS</i> (2022)	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Kuisisioner Penelitian	63
--	----

ABSTRAK

Ahmad Helmy Sulaiman. 2022, SKRIPSI. Judul: -Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang

Pembimbing : Isnan Murdiansyah, M.S.A

Kata Kunci : Akuntabilitas, Laporan, Keuangan

Reformasi yang sedang berlangsung di Indonesia mengubah banyak aspek salah satunya dalam sistem ekonomi yaitu penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dipahami sebagai laporan keuangan rahasia diperlukan untuk menjamin akuntabilitas. Laporan ini berisi semua informasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, yang harus diungkapkan oleh pemegang fidusia perusahaan kepada principal. Namun, pemerintah daerah di Kota Malang tidak melaporkan datanya dengan baik karena kurangnya pemahaman tentang standar tersebut, sehingga saat ini laporan keuangan Pemerintah Kota Malang sulit dipahami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, untuk mengetahui apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pengguna eksternal dan internal laporan keuangan pemerintah Kota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan lembar kuisioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kota Malang dan adanya pengaruh signifikan antara penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Kota Malang serta penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kota Malang.

ABSTRACT

Ahmad Helmy Sulaiman. 2022, THESIS. Title: "*The Effect of Presentation and Accessibility of Financial Statements on the Accountability of Financial Management in Malang City*"

Supervisor : Isnan Murdiansyah, M.S.A

Keywords : *Accountability, Reports, Finance.*

The ongoing reforms in Indonesia have changed many aspects, one of which is the economic system, namely the implementation of the regional financial management system. Accountability is understood as a confidential financial requirement to ensure accountability. This report contains all information relating to the company's finances, which must be disclosed by the fiduciary holder of the company to the principal. However, the local government in Malang City does not report its data properly due to lack of understanding of these standards, so currently the financial statements of the Malang City Government are difficult to understand.

This study aims to determine whether the presentation of regional financial statements affects the accountability of financial management accountability, to find out whether the accessibility of regional financial statements affects the accountability of regional financial management and to find out whether the presentation of regional financial statements and accessibility of regional financial statements regions have an influence on the accountability of regional financial management. The method used in this research is to use quantitative methods with a descriptive approach. The population in this study is external and internal users of the financial statements of the Malang City government. The data collection technique used is to use a questionnaire sheet.

The results showed that there was a significant influence between the accessibility of financial statements to the accountability of financial management of Malang City and the significant influence between the presentation of financial statements on financial accountability of Malang City and the presentation of financial statements and the accessibility of financial statements had a significant effect together with the accountability of financial management of Malang City.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang sedang berlangsung di Indonesia mengubah banyak aspek sistem politik, ekonomi dan sosial negara. Akibatnya, masyarakat menuntut tata pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk reformasinya yaitu penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah dan otonomi daerah. Hal itu ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 22 diundangkan pada tahun 1999 tentang perimbangan keuangan di pusat dan daerah. Tahun 2003 juga diterbitkan undang-undang tentang keuangan negara yang diberi nama Nomor 17. Beberapa pelepasan hukum lainnya terjadi antara tahun 2004 dan 2005, antara lain Nomor 32, yang menyangkut pemerintahan daerah; Nomor 33, yang membahas pengelolaan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat; dan Peraturan Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tahun berikutnya, terbit lagi undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bernama Undang-Undang Nomor 58.

Salah satu prinsip inti dari kebijakan pelaksanaan otonomi daerah adalah membuat rencana pelaksanaan otonomi daerah memerlukan izin dari pemerintah masing-masing daerah. Mereka tidak perlu mengikuti daftar langkah-langkah tertentu saat membuat keputusan keuangan. Ini karena mereka memiliki otoritas penuh atas semua keputusan keuangan di wilayah mereka. Dengan mengizinkan setiap daerah untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber keuangan mereka, rencana ini menghilangkan birokrasi yang tidak perlu dari proses keuangan. Para ahli di suatu daerah harus menyesuaikan fungsi dan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan daerah tempat tinggalnya. Hal ini disebabkan kewenangan daerah tidak ditangani oleh pemerintah pusat (Sanjaya, 2015). Karena daerah membutuhkan otoritas pengelolaan keuangan yang fleksibel, mereka juga membutuhkan praktik daerah yang legal, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan tidak menghukum (Defitri, 2018).

Akuntabilitas dipahami sebagai laporan keuangan rahasia diperlukan untuk menjamin akuntabilitas. Laporan ini berisi semua informasi yang berkaitan

dengan keuangan perusahaan, yang harus diungkapkan oleh pemegang fidusia perusahaan kepada prinsipal. Selain itu, kepala sekolah dapat meminta pengungkapan setiap kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini memberikan akuntabilitas antara pemegang fidusia perusahaan dan prinsipal. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 71 Tahun 2015, pemerintah wajib menyediakan informasi pelaporan keuangan publik yang benar, akurat, dan lengkap.

Hal ini diperlukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar memiliki akuntabilitas yang lebih besar dalam menangani dana publik, pelaporan keuangan sektor publik harus dilakukan secara terstruktur. Hal ini diperlukan karena banyaknya transaksi yang terlibat dalam setiap laporan keuangan (Wahidah, 2013). Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dari organisasi sektor publik. Penting untuk menyertakan laporan keuangan saat mengelola dana publik; Hal ini menyebabkan meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Nordiawan menjelaskan hal ini dalam makalah yang disampaikan kepada (Sande, 2013).

Aksesibilitas laporan keuangan adalah seberapa mudah seseorang dapat memperoleh informasi tentang laporan keuangan. Inilah sebabnya mengapa kebijakan perusahaan harus mudah diakses dan dikomunikasikan dengan baik. Hal ini juga berlaku untuk laporan mengenai kerugian di daerah, pelanggaran kewenangan pengelolaan, dan mata uang, surat berharga dan komoditi di daerah yang benar-benar ada dan pasti jumlahnya. Masyarakat saat ini menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Hal ini karena luasnya informasi yang disediakan oleh media seperti radio, televisi, website dan majalah. Outlet ini memberikan akses langsung ke banyak laporan keuangan penting yang membantu pemerintah bertanggung jawab kepada publik.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 Tahun 2021 mewajibkan pemerintah daerah untuk melaporkan data keuangannya secara terbuka. Namun, pemerintah daerah di Kota Malang tidak melaporkan datanya dengan baik karena kurangnya pemahaman tentang standar tersebut. Masalah ini harus segera diatasi agar pemerintah daerah dapat melaporkan data keuangan dengan baik untuk pertanggungjawaban. Saat ini laporan keuangan Pemkot

Malang sulit dipahami karena kurangnya SDM yang memahami logika akuntansi. Hal ini karena dengan menggunakan pembukuan berbasis akrual mensyaratkan penggunaan sumber daya manusia yang memahami logika akuntansi. Pemerintah daerah membutuhkan sistem akuntabilitas keuangan yang berfungsi dengan baik. Ini mengharuskan mereka untuk memahami pengaruh akun laporan keuangan pada transaksi sehari-hari, serta teknik pengelolaan anggaran yang tepat. Logika akuntansi harus dipahami dan diterapkan dengan benar untuk memenuhi standar pemerintah untuk pelaporan keuangan. Ini karena banyak pemerintah daerah tidak memiliki cukup orang dengan pengetahuan akuntansi untuk bekerja dengan mereka.

Badan Pusat Statistik merupakan badan pemerintahan baru di Kota Malang. Itu dibuat sebagai bagian dari upaya reformasi manajemen keuangan oleh pemerintah kota. Dengan badan baru ini muncul pengetahuan yang lebih baik tentang logika akuntansi dan pemahaman yang lebih besar tentang proses manajemen keuangan. Karena itu, konsekuensi dari tidak mengetahui logika akuntansi jauh berkurang. Pendapatan kota dari tahun 2017 hingga 2019 adalah Rupiah. Jika ditotal, terkumpul RP. 1.971.916.657,65 Rupiah pada tahun 2017 dan 1.971.916.657,65 Rupiah lainnya terkumpul pada tahun 2018 dan 2019. Laba bersih tahun 2018 adalah RP. 2.040.284.240,91; itu juga termasuk dana perimbangan, pendapatan tidak jelas lainnya dan PAD dari daerah. Laba bersih untuk 2019 saat ini diperkirakan mencapai RP. 2.247.769.414,04. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **-Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang**l.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

keuangan daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan akuntansi, khususnya dalam kaitannya dengan pengaruh aksesibilitas dan penyajian pelaporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, diharapkan temuan penelitian ini akan berfungsi sebagai dasar untuk perbandingan masa depan dari penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Malang dapat memasukkan temuan kajian tersebut ke dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan daerah..

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil – hasil penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya membantu penelitian memposisikan dirinya dan menunjukkan orisinalitasnya. Oleh karena itu, dengan kajian pustaka ini akan memberikan penjelasan atas beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, seperti berikut ini:

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Reni Rafika Sari (2014)	Pengaruh Sistem Pengadaan Internal, Sistem Akutansi Keuangan Daerah dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah	Variable Independe: Pengadaan Internal, Sistem Akutansi Keuangan Daerah dan Penyajian Laporan Keuangan Variable Dependen: Akuntabilitas Keuangan Daerah Siak	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penyajian laporan keuangan daerah, variabel sistem pengadaan internal, dan sistem akuntansi keuangan daerah.
2.	Hayani (2014)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Akseibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas	Variable Independen: Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Akseibilitas Laporan Keuangan dan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh SPIP, aksesibilitas laporan keuangan, dan penyajian. baik sebagian atau sekaligus.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Siak.	Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Siak.	
3.	Riyansa (2015)	Pengaruh Penyajian dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Independen: Penyajian dan Aksebilitas Laporan Keuangan Variabel Dependen: Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas atau pengelolaan keuangan. Sementara itu, ketersediaan laporan keuangan sangat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4.	Dewi Yuli Angraini, Restu Agusti, Lila Anggraini (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)	Variabel Independen: Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan, transparansi, aktivitas pengendalian, dan penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Koefisien determinasi dalam penelitian ini 60,4% sedangkan 39,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

5.	Nuria Rahma (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Akseibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Independen: Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Akseibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen: Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil studi menunjukkan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan ditingkatkan secara signifikan oleh sistem pengendalian internal pemerintah.
6.	Dede Aditya Permana (2018)	Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Independen: Transparansi Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	transparansi laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
7.	Rosa Nikmatul Fajri, Djumali, Djumali, Sri Hartono (2019)	Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Variabel Independen: Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi Variabel Dependen: akuntabilitas pengelolaan APBD	Penerapan sistem informasi keuangan daerah, Sistem pengawasan melekat, dan Penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD

2.2 Landasan Teori

Landasan teoritis menggambarkan teori – teori yang relevan mendukung penelitian. Teori – teori ini didukung oleh kerangka pemikiran, untuk merumuskan hipotesis dan menganalisis temuan penelitian.

1. Teori Stewardship

Grand theory di balik penelitian ini adalah bagian dari teori keagenan, teori manajemen (Donaldson dan Davis, 1991), yang menjelaskan bahwa Fokus utama manajemen adalah pada hasil utama organisasi daripada tujuan individu. Menurut teori ini, kesuksesan dan kepuasan dalam suatu organisasi sangat terkait. Keberhasilan suatu organisasi mencerminkan maksimalisasi utilitas kepala sekolah dan tim manajemen. Utilitas kelompok yang dimaksimalkan pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan kelompok organisasi.

Profesional akuntansi perlu menjadi lebih terspesialisasi untuk melayani kebutuhan profesi mereka yang terus berkembang. Ini karena akuntansi menjadi lebih kompleks karena sektor publik tumbuh lebih besar dan lebih rumit. Teori manajemen telah digunakan di pemerintahan, perusahaan, dan organisasi nirlaba lainnya. Misalnya, David menulis bahwa teori manajemen telah digunakan di sektor pemerintahan. Akuntansi adalah tentang memindahkan transaksi ke arah yang mereka inginkan. Kemampuan manajer untuk melaksanakan tanggung jawab manajemen mereka sendiri menjadi lebih sulit karena organisasi sektor publik berkembang dan menghadapi tuntutan akuntabilitas yang semakin meningkat. Akuntansi mendorong praktik akuntansi; itu alasan yang mendasari mengapa transaksi bergerak maju. Pemisahan antara manajemen dan kepemilikan ini menjadi semakin jelas karena semakin banyak organisasi yang menghadapi tuntutan yang meningkat akan akuntabilitas. Steward adalah individu yang paling memenuhi syarat untuk mengelola sumber daya karena mereka bekerja di bawah kepercayaan prinsipal mereka. Ini disebut sebagai amanah dalam hukum kontrak Islam dan mengacu pada kepercayaan. Dalam banyak kasus, prinsipal akan melimpahkan pengelolaannya kepada pihak lain karena berbagai keterbatasan dan larangan. Kontrak ini dilakukan secara kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Konsekuensinya, teori ini diterapkan pada organisasi sektor publik.

Stewardship theory mengemukakan bahwa suatu organisasi harus dipercaya untuk bertindak demi kepentingan publik karena harus mampu menjalankan tanggung jawab dan fungsinya secara efektif.. Ini termasuk pertanggungjawaban

keuangan, yang diamanatkan kepada pemerintah daerah. Dengan tercapainya tujuan tersebut, pemerintah daerah dapat secara efektif mencapai kesejahteraan

masyarakat, memberikan pelayanan publik dan mencapai tujuan ekonomi. Hal ini dicapai dengan mempekerjakan manajemen dan auditor internal, yang memanfaatkan keahlian mereka untuk membuat laporan yang mencerminkan data keuangan secara akurat..

2.3 Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah sumber informasi yang sangat penting bagi suatu manajemen dan juga investor (Murdiansyah, dkk, 2020). Laporan keuangan dari organisasi sektor publik membantu publik meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka. Laporan ini berisi informasi tentang keuangan, seperti transaksi dan rekening. Melalui informasi yang terdapat dalam keuangan tersebut maka akan terlihat kinerja perusahaan tersebut baik atau sebaliknya(Murdiansyah, dkk, 2020). Ada kebutuhan yang meningkat untuk pelaporan keuangan di sektor publik; ini karena banyak orang membutuhkan informasi tentang bagaimana kinerja pemerintah mereka (Mardiasmo, 2013). Peraturan pemerintah 2010 71 menyatakan bahwa laporan keuangan harus mencakup informasi tentang sumber daya pemerintah, utang dan ekuitas. Selain itu, pernyataan harus menyertakan informasi tentang bagaimana sumber daya dialokasikan dan digunakan. Persyaratan pernyataan juga menyatakan bahwa nilai yang dilaporkan sebelumnya harus dimodifikasi jika perlu dan pernyataan harus menjelaskan bagaimana kepatuhan anggaran dilakukan. Terakhir, pernyataan- pernyataan ini perlu menginformasikan tentang bagaimana anggaran diimplementasikan dan direalisasikan.. Pemerintah perlu menganggarkan kebutuhan kasnya dan membiayai kegiatannya melalui laporan dari suatu entitas. Entitas pelapor mendapatkan uang tunai melalui pendapatan dan layanan yang diberikan oleh Modal Kerja. Mereka dapat menggunakan ini untuk menilai kemampuan mereka mendanai pengeluaran yang akan datang. Laporan keuangan yang telah ditelaah oleh publik dianggap lebih dapat dipercaya dan adil sehingga bermanfaat bagi manajemen dan pihak pengambil keputusan lainnya.(Murdiansyah, dkk, 2021).

Teori Ketidakmungkinan diciptakan pada tahun 1973 oleh Deniski. Sujana menulis tentang teori tersebut pada tahun 2002, menyatakan bahwa hampir tidak mungkin menciptakan informasi yang berguna bagi semua kelompok orang—

karena kepentingan mereka sangat beragam. Menurut Wilson dan Kattelus dalam (Rohman, 2009), sistem akuntansi pemerintah harus melakukan 24 tugas yang berbeda. Ini termasuk mengumpulkan data dari berbagai sistem, serta melakukan penyesuaian akun.:

1. Mencatat peruntukan dana
2. Mencatat penerimaan kas
3. Mencatat pengeluaran kas
4. Memposting piutang
5. Setelah utang usaha
6. Pendapatan pasca tangguhan
7. Kewajiban pasca pensiun
8. Setelah keuntungan yang belum direalisasi
9. Memelihara akun anggaran dan sub-anggaran
10. Memelihara catatan investasi
11. Menyiapkan laporan aktiva bersih
12. Menyiapkan laporan pendapatan, pengeluaran, dan perubahan saldo dana
13. Menyiapkan catatan penggajian
14. Menyiapkan ringkasan akuntansi
15. Menyajikan informasi anggaran
16. Menyajikan laporan keuangan
17. Menyediakan aset, kewajiban, dan posisi bersih pemerintah
18. Menyediakan dokumentasi pendukung untuk estimasi akuntansi yang signifikan
19. Memberikan deskripsi dan penjelasan untuk estimasi akuntansi tidak signifikan
20. Memberikan asersi tentang kelengkapan laporan keuangan
21. Laporan ketika laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya telah salah saji secara material
22. Membuat pernyataan tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
23. Membuat asersi tentang asersi manajemen tentang pengendaliannya
24. Membuat asersi tentang asersi manajemen tentang apakah ada ketidakpastian signifikan yang akan mempengaruhi kemampuan

pemerintah untuk mencatat, memproses, dan melaporkan informasi yang relevan secara tepat waktu 1 = Unit pemerintah harus menunjukkan aktivitas keuangan mereka menurut GAAP, dan menunjukkan semua dana yang terkait dengan aktivitas. Mereka harus Laporan harus mematuhi persyaratan kontrak dan keuangan. Departemen akuntansi perlumemastikan persyaratan ini terpenuhi sehingga laporan yang akurat dapat dihasilkan.

Pelaporan keuangan yang berkualitas dapat dipakai manajemen dalam rangka untuk pengambilan keputusan bisnis (Murdiansyah, dkk, 2021). Standar pelaporan berbasis akrual berisi 12 informasi khusus yang diperlukan agar laporanbermanfaat bagi kebanyakan orang. Pemerintah memberlakukan standar tersebut melalui peraturan no. 71 Tahun 2010. Undang-undang ini menggariskan data yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam penyampaian laporan atau informasi keuangan kepada publik, dibutuhkan standar yang baik supaya pembuat laporan keuangan dan pembaca memiliki pedoman yang sama (Juniaswati & Murdiansyah, 2022). Selainitu, laporan ini harus memenuhi tujuan dan karakteristik tertentu, sebagai berikut:

1. Relevan berarti bahwa informasi yang dikandungnya memiliki potensi untuk memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka dalam mengevaluasi kejadian baru-baru ini atau yang akan datang, membuat prakiraan untuk masa depan, dan memperbaiki evaluasi mereka di masa lalu. Unsur-unsur informasi yang relevan adalah sebagai berikut:
 - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Pengguna dapat mengonfirmasi atau menyesuaikan harapan mereka sebelumnya berkat informasi.
 - b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Berdasarkan hasil sebelumnya dan kejadian terkini, informasi dapat membantu pengguna dalam membuat ramalan untuk masa depan.
 - c. Tepat waktu Saat mengambil keputusan, informasi yang tepat waktu dapat berdampak dan bermanfaat.
 - d. Lengkap, yang mencakup semua data akuntansi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Untuk mencegah kesalahan dalam

penggunaan informasi, informasi yang terdapat di bawah setiap informasi utama dalam laporan keuangan dibuat sangat jelas.

2. Andalan yaitu mengacu pada kenyataan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara akurat, dan dapat diverifikasi.
 - a. Penyajian jujur. Transaksi dan peristiwa lain yang dimaksudkan untuk direpresentasikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk direpresentasikan secara akurat diwakili oleh data.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Data dari laporan keuangan dapat diuji, dan hasilnya sama terlepas dari berapa kali dilakukan oleh pihak yang berbeda.
 - c. Netralitas, atau informasi yang melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan beberapa individu atau kelompok.
 - d. Data dapat dibandingkan yang artinya Data akuntansi harus dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya di perusahaan yang sama atau bisnis lain yang beroperasi pada waktu yang sama di industri yang sama.
 - e. Dapat dipahami artinya informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai karena disajikan dalam bentuk dan format yang disesuaikan dengan keterbatasan pemahamannya.

Laporan keuangan satuan kerja pemerintah yang dikenal dengan satuankerja perangkat daerah atau SKPD wajib disusun oleh pengguna anggaran. Mereka juga bertanggung jawab untuk menghitung uang dan aset yang dimiliki unit-unit ini, serta utang dan ekuitas mereka. Materi pendukung meliputi pendapatan dan beban perdagangan satuan kerja perangkat daerah, serta beban dan pendapatan perdagangan Satker. Pemerintah daerah harus memenuhi standar kualitatif laporan keuangan agar dapat melaporkan data keuangannya dengan baik. Ini termasuk menyajikan semua informasi keuangan dengan cara yang benar-benar jujur. Idealnya, ini mengarah pada laporan keuangan yang lebih jelas seperti di bawah ini: Setiap laporan keuangan dari pemerintah daerah mengikuti standar dan peraturan akuntansi nasional. Pembuatan laporan yang transparan dan

akuntabel nantinya akan meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan ini berisi semua informasi yang diperlukan; ini mengarah pada akuntabilitas dan transparansi.

Menurut (Nordiawan & Hertianti, 2010), Laporan keuangan disajikan karena alasan berikut:

1. Memberikan informasi mengenai pendapatan yang tersedia pada periode berjalan yang cukup untuk menutup semua biaya;
2. Memberikan informasi mengenai kesesuaian metode perolehan sumberdaya keuangan dan pengalokasiannya dalam anggaran yang telah dialokasikan.;
3. Memberikan data penggunaan sumber daya keuangan;
4. Jelaskan metode entitas pelapor untuk membiayai seluruh operasi dan kebutuhan kasnya.
5. Memberikan informasi mengenai kondisi keuangan entitas pelapor sehubungan dengan sumber pendapatannya;
6. Berikan perincian tentang bagaimana situasi keuangan entitas pelapor telah berubah.

Laporan anggaran dan laporan keuangan membentuk komponen pelaporan keuangan. Kumpulan laporan adalah komponen pelaporan keuangan dan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Saldo Anggaran Atas Perubahan;
3. Hutang dagang;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas Perubahan Ekuitas;
6. Tambahan Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan tanggung jawab seorang akuntan (Murdiansyah, 2022). Sumber daya dan kewajiban keuangan entitas pelapor, serta aliran sumber daya sepanjang periode, harus dicantumkan dalam laporan. Mereka juga memberikan informasi untuk membantu pengguna memperkirakan hasil operasi entitas, mengelola aset, membuat keputusan tentang alokasi sumber daya, dan banyak lagi. Membuat laporan keuangan publik diperlukan untuk akuntabilitas dan transparansi. (Jack,

2002) menjelaskan hal ini sebagai aspek penting dari laporan keuangan. Manfaat informasi keuangan dalam laporan keuangan antara lain: pengelolaan kas masuk dan keluar, aset, dan utang oleh pengelola, seperti kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah; Keterbukaan kegiatan pemerintahan. Hal ini karena adanya persyaratan SAP berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71. Peraturan ini mencantumkan sekurang-kurangnya 12 hal yang muncul dalam neraca, antara lain investasi jangka pendek, persediaan, investasi jangka panjang, piutang pajak dan bukan pajak, kas dan setara kas, aktiva tetap, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, -panjang kewajiban berjangka. Pengungkapan data keuangan pemerintah membantu menjaga akuntabilitas dan transparansi. Tujuan ini dicapai dengan membuat informasi tentang keuangan pemerintah tersedia untuk umum. Beberapa manfaatnya adalah memberikan data bagi pejabat untuk membuat keputusan yang berarti dan mempermudah pihak ketiga untuk menilai posisi keuangan. Bukan hanya itu pelaporan keuangan yang berkualitas dapat dijadikan sebagai bahan dari kerangka pengambilan keputusan bisnis (Murdiansyah, dkk, 2021).

2.4 Aksesibilitas laporan keuangan daerah

Koester (2002) mendefinisikan aksesibilitas sebagai kemudahan perpindahan antara dua lokasi atau kemampuan untuk menghubungkan dua tempat. Aksesibilitas dalam laporan keuangan menyangkut tersedianya informasi laporan keuangan bagi seseorang. Ini dapat diperoleh oleh siapa saja, terlepas dari lokasi atau transportasi (Mulyana, 2006). Padahal, aksesibilitas merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah (Mardisme 2012). Informasi keuangan diperlukan untuk membuktikan akuntabilitas dan manajemen oleh organisasi publik. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki hak atas informasi terkait keuangan.

Masyarakat memiliki hak untuk mengakses data keuangan pemerintah karena mereka memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menangani urusan keuangan mereka. Informasi ini kemudian digunakan untuk membuat keputusan politik, ekonomi dan sosial seperti yang diminta oleh warga negara. Pemerintah harus memberikan data ini kepada mereka yang memintanya. Akuntabilitas tergantung pada memiliki akses ke laporan keuangan yang dapat

dibaca dan dipahami. Sebab, melalui media seperti majalah, stasiun radio, website, dan surat kabar, pertanggungjawaban diberikan kepada publik. Selain itu, forum yang secara langsung membahas akuntabilitas dalam pemerintahan diperlukan untuk mendorong inklusi dan transparansi (Shende & Bennett, 2004). Untuk memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas, DPRD mewajibkan pemerintah daerah menyediakan informasi keuangan. Hal ini dapat dicapai dengan semua pemerintah daerah meningkatkan aksesibilitas mereka terhadap informasi yang mereka berikan. Selain itu, membuat laporan keuangan lebih mudah tersedia untuk publik meningkatkan aksesibilitas lebih jauh.

2.5 Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah

Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang baik dapat disampaikan kepada DPRD dan bahan evaluasi kegagalan dan keberhasilan masyarakat untuk tahun berikutnya sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat tidak hanya memiliki hak Tahu bagaimana mengelola uang tetapi memiliki hak untuk menuntut Bertanggung jawab atas penerapan dan pelaksanaan manajemen Keuangan Daerah (Halim, 2007). Organisasi publik dituntut untuk memenuhi dimensi akuntabilitas sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dan publik.
2. Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas sudah memadai dalam hal kecukupan prosedur administrasi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi. Penyediaan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan murah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas proses.
3. Akuntabilitas program terkait dengan penentuan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dan apakah program lain yang memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah telah dipertimbangkan.

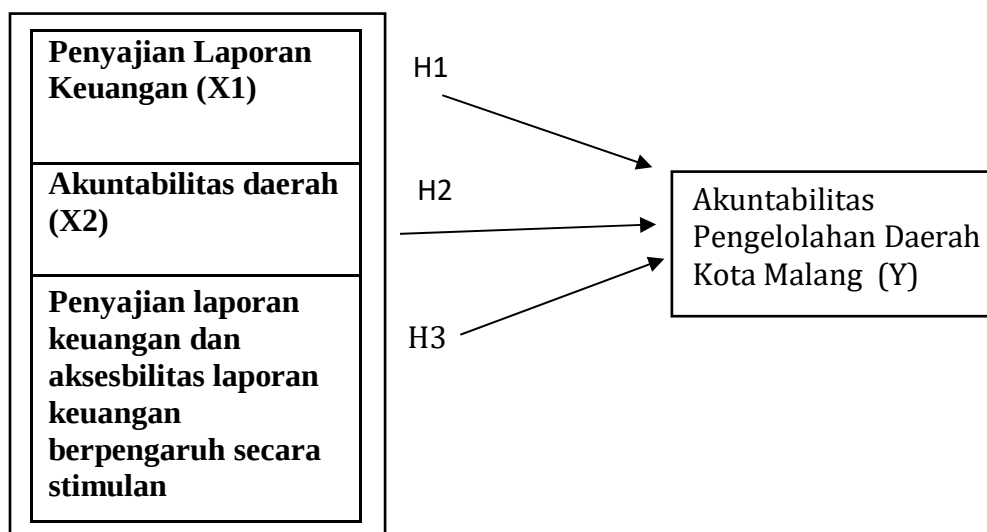
4. Akuntabilitas Kebijakan, khususnya tanggung jawab pelatih, pengurus, dan manajer atas kebijakan yang diterapkan.

Katz (2013) menyatakan bahwa transparansi adalah sebuah proses Dasar demokrasi terlihat oleh setiap warga negara terbuka dan eksplisit tentang kegiatan pemerintah mereka, bukan kerahasiaan kegiatan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui tanggung jawab pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan. Nomor Peraturan Pemerintah 71, yang berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, mewajibkan laporan keuangan pemerintah daerah mencakup hal-hal berikut: laporan operasi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan adalah semua bentuk pencapaian anggaran laporan. Sesuai dengan uraian di atas, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara terbuka dan jujur di depan masyarakat. digambarkan dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada publik melalui media, dengan asumsi bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui informasi tersebut.

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu krusial adalah kerangka konseptual. Hubungan antar variabel yang akan diteliti secara teoritis dapat dijelaskan dengan sikap mental positif. Oleh karena itu, secara teoritis, hubungan antara variabel independen dan dependen harus dijelaskan. Dan adapun kerangkanya:

Gambar2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Peneliti telah mengolah data.

Keterangan :

—————► : Pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)

—————► : Pengaruh X1, X2, bersama-sama pada Y.

2.7 Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan harus mengikuti format tertentu. Laporan ini merinci transaksi dan status keuangan lembaga keuangan. Undang-undang yang disebut UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa keuangan daerah meliputi segala kewajiban dan hak yang berkaitan dengan daerah tertentu. Ini juga berarti uang, barang dagangan, dan properti lain yang dapat digunakan untuk properti pribadi di wilayah tersebut. Mardisamo (2013) menunjukkan bahwa akuntabilitas mengacu pada konsep yang lebih luas daripada housekeeping. Merupakan tanggung jawab untuk mengelola aktivitas yang tidak memerlukan kewajiban pelaporan atau biaya tambahan. Hal tersebut adalah tindakan bertanggung jawab kepada donor melalui tanggung jawab pelayan. Dalam mewujudkan akuntabilitas, terdapat indikator berbagai jenis akuntabilitas yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pemangku kepentingan dan masyarakat luas (Juniaswati & Murdiansyah, 2022). Ada lima indikator dalam indikator akuntabilitas diantaranya memiliki prosedur operasi standard (SOP), ada sistem pemantauan, ada cara untuk meminta pertanggungjawaban orang, adanya laporan setiap tahun, adanya sistem *punishment* dan *reward* (Juniaswati & Murdiansyah, 2022). Terciptanya sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah menuntut penyajian laporan keuangan daerah karena berbagai alasan. Pemerintah daerah harus dapat menyiapkan laporan ini dengan cara yang sesuai dengan GAAP saat ini dan standar kepatuhan. Mereka juga perlu menyajikan laporan keuangan kualitatif, yang menjelaskan transaksi keuangan secara lengkap. Hal ini karena pemerintah daerah dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran pelaporan keuangannya dan semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(Sande, 2013). Pengaruh laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan sangat didukung baik oleh (Nurhayani, 2010) maupun Sande (2013). Klaim pertama bahwa peningkatan akuntabilitas keuangan daerah dihasilkan dari laporan keuangan yang tinggi. Yang terakhir menyatakan bahwa peningkatan penyajian laporan keuangan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara signifikan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peningkatan jumlah laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas di daerah. Teori dan bukti yang terbukti mendukung gagasan bahwa laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan berkat pernyataan yang andal, dapat dipahami, dan disebutkan. Ini mengarah pada pengembangan hipotesis:

H1 : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang.

2.7.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.

Laporan keuangan mudah diakses, membuatnya mudah untuk mendapatkan informasi dari mereka (Mulyana, 2006). Pemerintah daerah harus terbuka terhadap pemangku kepentingan secara luas tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkannya, seperti: Penerbitan Laporan Keuangan Daerah melalui Surat Berita, Internet atau sarana lainnya (Permendagri No. 21 Tahun 2010). (Sande, 2013) menyatakan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Temuan studi ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah akan dihasilkan dari peningkatan aksesibilitas laporan keuangan. Hipotesis berikut dikembangkan berdasarkan deskripsi ini dan penelitian sebelumnya:

H2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Kota Malang.

2.7.3 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2009) Laporan keuangan sektor publik memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitasnya. Contoh demokrasi terbuka antara lain media seperti surat kabar, majalah, stasiun radio dan televisi, situs web, dan forum yang memberikan perhatian langsung atau berperan dalam mempromosikan

akuntabilitas pemerintah kepada rakyat (Shande dan Bennet, 2004). (Sande, 2013) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat secara signifikan dengan aksesibilitas laporan keuangan dan penyajiannya. Hipotesis berikut dikembangkan berdasarkan deskripsi ini dan penelitian sebelumnya:

H3 : Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang.

2.8 Prespektif Akuntabilitas Laporan Keuangan Menurut Kajian Islam

2.8.1 Pengertian Transaparasi

Untuk menjaga transparansi, publik harus mendapatkan akses yang bebas dan terbuka untuk semua informasi yang relevan di semua bidang seperti politik, ekonomi, kelembagaan dan hukum. Ini harus dapat diakses dengan biaya rendah dengan campur tangan minimal dari pemerintah. Hal ini dapat dicapai melalui media massa yang bertanggung jawab, transparan, dan menyajikan berita terkini secara berkala. Pemerintahan yang transparan dan mudah diakses dapat membantu masyarakat dalam memahami kebijakan dan undang-undang yang diberlakukan. Ini mengarah pada tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel, yang mendorong layanan masyarakat yang responsif. Prabowo (2017) mencatat bahwa transparansi berasal dari penyediaan informasi publik tentang pembuatan kebijakan yang dapat diakses oleh semua warga negara.

Transparansi penting bagi entitas publik untuk memaksimalkan perannya dan bertahan sebagai pengendalian sebuah organisasi (Juniaswati & Murdiansyah, 2022). Transparansi yang efektif mengharuskan semua keputusan dan implementasi mengikuti hukum dan peraturan. Informasi harus mudah diakses oleh siapa pun yang terkena dampak keputusan sehingga transparansi yang tepat tercapai. Penting juga untuk memberikan informasi dengan cara yang mudah dipahami dan dicerna. Informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami sangat penting untuk menjaga transparansi. Orang-orang di sektor publik dan swasta perlu transparan karena tuntutan lingkungan akan informasi. Informasi tidak selalu dapat bergerak melalui sistem tertentu tanpa hambatan. Ini karena manajemen tidak transparan dalam operasi mereka. Kebanyakan orang menganggap transparansi sebagai hal yang baik, karena membangun kepercayaan, kredibilitas, penggunaan sumber daya yang efisien, dan kolaborasi. Itu juga

Mengingat bahwa transparansi mengacu pada keadaan keterbukaan sehubungan dengan kebijakan dan kegiatan pemerintah, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan mencakup semua keputusan manajemen. Prinsip transparansi mempromosikan kepercayaan antara publik dan pemerintah mereka dengan memberikan akuntabilitas yang jelas dan informasi keuangan. Aksesibilitas yang meningkat ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengumpulkan informasi yang akurat tentang pemerintah mereka, yang mengarah pada kenyamanan yang lebih dalam kehidupan sehari-hari. Transparansi adalah keterbukaan sumber keuangan dan informasi tentang penggunaan.

Allah SWT membahas konsep transparansi (keterbukaan informasi) Islam dalam Q.S. Al-Baqarah (282):

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah

35

berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang lakilaki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang- orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan jangan bosanmenulisnya karena tenggat waktunya singkat, dan utangnya bisa kecil atau besar.

Yang demikian itu lebih benar di sisi Allah, dapat menguatkan kesaksian, dan mendekatkan kamu pada keragu-raguan, kecuali jika itu adalah transaksi tunai di antara kamu, maka tidak ada dosa jika kamu tidak mencatatnya.. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah: 282).

Agar publik mengetahui dan memantau kebijakan pemerintah, maka transparansi di ranah pemerintahan terkait dengan hal tersebut. Karena Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah memerlukan transparansi, yang pada akhirnya akan menghasilkan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, akuntabel, dan tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat.. Sifat kenabian Muhammad SAW relevan dengan konsep transparansi ajaran Islam. Hal ini didukung oleh wahyu Muhammad Syafi'i Antonio bahwa Rasulullah SAW memiliki nilai-nilai kenabian bisnis dan manajemen (prophetic values, business and management) diantaranya:

1. Siddiq (benar), integritas adalah nilai fundamental. Kejujuran, ketulusan, keamanan, keseimbangan, dan kesejahteraan emosional adalah nilai-nilai bisnis dan manajemen.
2. Amanah. Nilai-nilai bisnis dan manajemen meliputi kejujuran, keterbukaan, kepercayaan, tanggung jawab, dan ketepatan waktu. Kepercayaan adalah salah satu nilai fundamental.
3. Fathonah merupakan bidang kajian yang luas; Visi dan kepemimpinan yang terampil adalah nilai-nilai manajemen dan bisnisnya..
4. Tabligh nilai dasarnya adalah pendelegasian wewenang, kerja tim, koordinasi, kontrol, dan pengawasan, serta nilai-nilai dasar tabligh komunikatif dan sosialisasi dalam bisnis dan manajemen (Antonio: 2014).

Keterampilan komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, merupakan manifestasi dari nilai kejujuran (Shiddiq) dan keterbukaan/transparansi kepada publik (Tabligh), sehingga memudahkan mereka yang membutuhkan informasi untuk membaca dan memahami maksud penyelenggara. Pengguna akan dengan cepat dan tepat memahami informasi yang disajikan jika kejujuran dan keterampilan komunikasi digabungkan. Pada masa pemerintahan Al-Khulafa Al Rasyidin, Islam juga menganut keterbukaan. Misalnya, ketika Umar bin al-

Khattab memimpin, Khalifah mendirikan kantor perbendaharaan dan keuangan negara di bawah arahan Umar. Umar dikenal sangat menjunjung tinggi profesionalisme dan keahlian di bidangnya saat merekrut pejabat. Untuk menjauhkan diri dari praktik pengangkatan gubernur menjadi pemerintah daerah, ia melakukan hal tersebut. Tanggung jawab mereka adalah untuk memeriksa ketidakberesan bagian regional dan menerima laporan dari penduduk setempat tentang pejabat (Iqbal:2014). Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip keterbukaan kepada semua pihak.

Al-Qur'an menawarkan nasihat tentang bagaimana menjalankan pemerintahan untuk mempromosikan pemerintahan yang baik.. Konsep tata pemerintahan yang baik dalam Al-Qur'an sebenarnya tidak hanya berlaku bagi pemerintah tetapi juga bagi setiap organisasi dan kehidupan kita sehari-hari. Berikut konsep good governance yang digariskan dalam Al-Qur'an:

Terkait dengan akuntabilitas adalah akuntabilitas. Kata "akun", yang artinya menghitung sesuatu, adalah akar kata "akun". Dalam Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan diperhitungkan di akhirat, sekalipun sebesar biji dzarrah. Hal ini disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Bukhari -Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (HR. Al-Bukhari Muslim).. Komitmen seorang pemimpin dan mereka yang beriman kepada pemerintah akan memberikan dampak yang signifikan terhadap proses reformasi birokrasi menuju *good governance*.

1. Transparansi terbuka untuk semua kebijakan dan tindakan pemerintah. Kemajuan dan tingkat keberhasilan program pemerintah yang baru dilaksanakan dapat dipantau secara transparan oleh publik. Transparansi pemerintah akan mengurangi tingkat korupsi, sehingga diperlukan transparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*). Transparansi adalah komponen penting.
2. Pada hakikatnya keadilan adalah memperlakukan seseorang atau sesuatu yang lain sesuai dengan haknya. Setiap orang berhak untuk diperlakukan secara bermartabat, setara, serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, tanpa memandang suku, agama, atau keturunan.

Istilah -keadilan merujuk pada keadilan sosial ketika membicarakan penyelenggaraan pemerintahan yang adil. Dengan kata lain, pemerintah menetapkan segala kebijakan di segala bidang menurut asas keadilan agar rakyat tidak merasa tertindas. Sebaliknya, perilaku individu yang menerapkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai keharmonisan disebut sebagai keadilan dalam arti masyarakat yang adil (Ramadhan : 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

Langkah dan prosedur yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi empiris untuk memecahkan masalah dan menguji hipotesis penelitian disebut sebagai metode penelitian.

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif memiliki struktur yang lebih teratur dan sistematis, serta direncanakan secara teratur dari awal hingga akhir penelitian (Sugiyono, 2009).

BKAD di lingkungan pemerintah Kota Malang merupakan populasi yang menjadi sasaran peneliti dalam penelitian ini yang meneliti pengguna internal dan eksternal laporan keuangan pemerintah.. pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *proporsionate stratified random sampling*; yakni, suatu teknik pemilihan sampel yang apabila populasinya tidak (heterogen), yang terdiri dari beberapa kelompok dengan kategori yang berbeda. Dalam menentukan ukuran sampel total populasi 36 orang.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor BKAD Kota Malang. Kiduldalem, Kec, Majapahit Simpang No 1 65119, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

3.3 Populasi dan Sampel

Responden penelitian ini adalah kepala sekretaris BKAD, kepala lapangan, kepala seksi, dan staf dari masing-masing BKAD. Baik pengguna laporan keuangan internal maupun eksternal dari pemerintah Kota Malang diikutsertakan dalam populasi penelitian. terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dan LSM di Wilayah Kota Malang. Dalam menentukan jumlah besarnya sampel dari total populasi sebanyak 33 orang, maka digunakan rumus Slovin (Husein, 1999:59) seperti di bawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Nilai kritis yang diinginkan sebesar 5%

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah *nonprobability sampling* yaitu *incidental sampling*. Pengambilan sampel *incidental sampling* yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan individu tersebut memenuhi kriteria yang dapat digunakan sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk sampel (Sugiyono, 2018). Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan alasan besarnya

$$= \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan dengan memilih anggota sampel yang ditolerir sebesar 10%

3.5 Data dan Jenis Data

Data primer dan data sekunder merupakan dua kategori data yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi yang dikumpulkan dari informan merupakan data primer. (Indriantoro dan Supomo, 2013). Dengan menyebarkan kuisioner pada responden. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung berupa data, dokumen, dan laporan, baik diumumkan maupun tidak (Indriantoro dan Supomo, 2013).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulka dalam penelitian ini yaitu berupa data kauntitatif. Data tersebut merupakan data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada partisipan guna mengumpulkan informasi tentang 27 faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan dan aksesibilitas dalam membangun akuntabilitas laporan keuangan daerahpemerintah Kota Malang.. Responden pada penelitian ini, berjumlah 33 orang.

3.7 Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah petunjuk untuk menemukan berbagai informasi dan data di lokasi penelitian dengan menggunakan data primer dan observasi atau data sekunder dari survey (Suyonto, 2013). Untuk menghindari pertanyaan ganda, Indikator untuk setiap variabel didasarkan pada definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai tolak ukur.

Tabel 3. 1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Skala	Sumber
Penyajian laporan keuangan daerah	Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dipahami 4. Dapat dibandingkan	Likert	Peggy Sande (2013)
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	Kemudahan seseorang dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan suatu daerah	1) Keterbukaan 2) Kemudahan 3) <i>Accesible</i>	Likert	Peggy Sande (2013)

	disebut dengan aksesibilitas laporan keuangan.			
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pengguna laporan keuangan merupakan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.	1) Akuntabilitas untuk kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum. 2) Jaga akuntabilitas. 3) Akuntabilitas program 4) Akuntabilitas Kebijakan	Likert	Peggy Sande (2013)

3.8 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan suatu metode untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas dalam penulisan ini. Dengan menggunakan kuesioner, akan dibagikan daftar pertanyaan tentang variabel-variabel yang diteliti dalam kaitannya dengan karakteristik laporan keuangan dan kriteria akuntabilitas laporan keuangan untuk keperluan pengumpulan data dalam penelitian ini. Kuesioner diberikan dengan mengantar langsung dan dititipkan kepada staf di kantor. Metode penelitian kepustakaan yang mengkaji berbagai bahan bacaan, termasuk buku teori, karya ilmiah, jurnal, dokumen, dan laporan, termasuk berbagai peraturan yang berkaitan dengan variabel penelitian. Strategi pelengkap untuk membuktikan temuan penelitian adalah dokumentasi data sekunder. Informasi sekunder adalah dokumentasi. Segala sesuatu yang dianggap benar tentang catatan, catatan peristiwa, dan hal-hal atau kegiatan termasuk dalam jenis dokumentasi ini.

3.9 Analisis Data

3.9.1 Analisis Deskriptif

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka tujuan analisis data dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Setelah hasil kuesioner dianalisis, data dikuantifikasi untuk analisis statistik.

3.9.2 Uji Kausalitas Data

a. Uji Realibilitas

Reliabilitas kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel

penelitian diuji dengan menggunakan uji reliabilitas.. Jika tanggapan responden terhadap suatu kuesioner konsisten dari waktu ke waktu, maka dikatakan reliabel atau dapat diandalkan. Oleh karena itu, tujuan uji reliabilitas adalah untuk memastikan apakah responden konsisten dengan kuesioner penelitian..Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus *Cronbach's Alpha*. Kriteria dalam pengujian reliabilitas berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha*, menurut (Sekaran, 2006), Nilai Alpha Cronbach kurang dari 0,60 biasanya menunjukkan situasi yang buruk, sedangkan nilai lebih besar dari 0,80 dianggap dapat diterima.

3.10 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Uji penyimpangan asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa metode analisis regresi yang digunakan dapat dipahami atau hasil interpretasinya tidak biasa.

1. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas Data bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi berdistribusi normal..

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang dikembangkan memiliki tingkat korelasi yang tinggi antar variabel bebas atau tidak.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian antara residual dari pengamatan yang berbeda dalam model regresi.

3.11 Pengujian Hipotesis

Hubungan di mana satu atau lebih variabel independen mempengaruhi variabel dependen lainnya dijelaskan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam analisis regresi linier berganda, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat diukur, tetapi arah pengaruhnya juga diperlihatkan. Proses analisis regresi linier berganda akan dibantu oleh aplikasi Eviews Version

12. Persamaan regresi linier berganda menjadi dasar pengujian tersebut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

X1 : Pengaruh Penyajian Keuangan Daerah

X2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

a : Konstanta

b1 : koefisien regresi dari X1

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) 31 digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

2. Uji Statistik F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi berganda model tetap dan apakah variabel independen dan dependen memiliki efek terpisah atau gabungan satu sama lain. Tingkat signifikansi = 0,05 digunakan sebagai tolak ukur pengujian ini untuk membandingkan nilai sig yang diperoleh. Model yang digunakan bersifat tetap jika nilai sig yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikansinya.

3. Uji Statistik t

Statistik t digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variasi variabel dependen. Tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05 (5%).

Jika nilai t hitung $> t$ tabel dengan signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikan di bawah 0,05. Sebaliknya jika t hitung $< t$ tabel dengan signifikan 0,05, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau dapat dilakukan dengan melihat signifikansi yang berada di atas 0,05

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Deskriptif

Nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel dalam suatu penelitian semuanya dideskripsikan dengan menggunakan statistik deskriptif. Berikut hasil analisis statistik deskriptif penelitian ini:

Tabel 4. 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Date: 12/24/22 Time: 18:42 Sample: 1 33			
	AK	P	A
Mean	3.696970	3.787879	3.848485
Median	4.000000	4.000000	4.000000
Maximum	4.000000	4.000000	4.000000
Minimum	3.000000	3.000000	3.000000
Std. Dev.	0.466694	0.415149	0.364110
Skewness	-0.857195	-1.408374	-1.943855
Kurtosis	1.734783	2.983516	4.778571
Observations	33	33	33

Sumber: Data olahan *evIEWS* (2022).

Dengan merujuk pada tabel deskriptif di atas, maka dapat diperoleh gambaran hasil analisis statistik deskriptif sebagai berikut:

- a. Tampilan tabel output *evIEWS* di atas pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang (AK) menunjukkan bahwa terdapat 33 sampel, dengan nilai rata-rata 3,6969 dan standar deviasi 0,4666, dengan nilai minimum 3,00 dan nilai maksimum 4,00.
- b. Tampilan tabel output *evIEWS* di atas pada variabel Penyajian Laporan Keuangan (P) menunjukkan bahwa ada 33 sampel, dengan nilai rata-rata 3,7878 dan standar deviasi 0,4151. Nilai minimal 3,00, nilai maksimal 4,00, dan nilai rata-rata 3,7878.
- c. Tabel keluaran variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (A) menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) adalah 33, nilai rata-ratanya adalah 3,8484, standar deviasinya adalah 0,3641, dan nilai minimumnya adalah 3,00.

4.2 Hasil Analisis Uji Kausalitas Data

a. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat apakah kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian dapat digunakan. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah jawaban kuesioner penelitian sudah akurat. Hasil Uji reliabilitas dapat disajikan sebagaimana berikut:

Tabel 4. 3
Hasil Uji Reabilitas

	A	P
A	0,132576	0,091856
P	0,091856	0,172348

Sumber: Data olahan *eviews* (2022).

Keterangan:

: varian
 : kovarian

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai Cornbach's Alpha maka harus dihitung dengan rumus berikut:

$$\alpha = \frac{Nc}{v(N-1)c}$$

$$\alpha = \frac{2(0.091856)}{0.152462(2-1)0.091856}$$

$$\alpha = \frac{0.183712}{0.244318} = 0.751938$$

Dengan merujuk pada Kriteria dalam pengujian reliabilitas berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha*, menurut (Sekaran, 2006), secara umum apabila didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* kurang dari 0,60 berarti buruk, sekitar 0,70 diterima dan lebih dari 0,80 adalah baik. Hasilnya, terlihat bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan dan tanggapan responden terhadap kuesioner tersebut konsisten. Hal ini ditetapkan dari hasil analisis nilai *Cornbach's Alpha* sebesar 0.75 yang mana masih dalam sekitar 0,70 sehingga kuesioner ini dinyatakan reliable.

4.3 Hasil Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

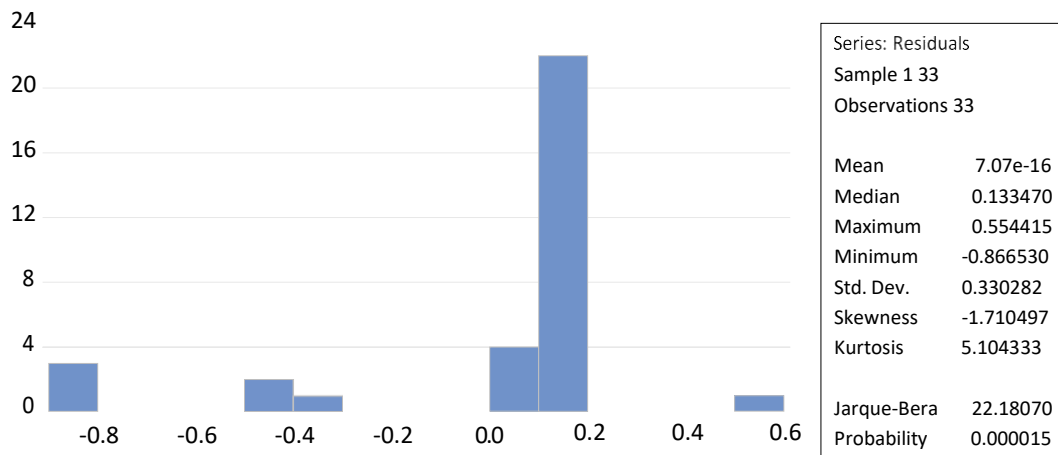
A. Uji Normalitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan apakah nilai residual standar model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai Jarque-Bera dan nilai Probabilitas (Nilai-P) diperiksa selama pengujian ini.

- a. Nilai J-B tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data berdistribusi normal

- b. Data berdistribusi normal jika probabilitasnya lebih besar dari 5%. (hipotesis nolnya adalah data berdistribusi normal). Dari uji tersebut penulis menghasilkan output sebagai berikut:

Gambar 4. 1
Data olahan *evIEWS* (2022)



Hasil estimasi uji normalitas menunjukkan bahwa uji tersebut tidak berdistribusi normal karena nilai jarque-bera lebih besar dari 2 yaitu 22,18070, dan nilai probabilitasnya kurang dari 5% yaitu 0,000015. Hal ini terlihat dari tampilan gambar keluaran *evIEWS* di atas.

B. Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menentukan apakah model regresi penyelidikan mengungkapkan korelasi antara variabel independen..Menurut Ghozali (2011) dengan memperhatikan besarnya nilai toleransi dan besarnya VIF maka dilakukan pengujian multikolinearitas. Pedoman penggunaan Toleransi dan VIF untuk membuat keputusan mengenai uji multikolinearitas:

➤ Berdasarkan nilai Tolerance :

1. Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.
2. Jika nilai Tolerance lebih kecil dari 0,10 maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

➤ Berdasarkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) :

1. Jika nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi
2. Jika nilai VIF > 10,00 maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Berikut hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini:

Tabel 4. 4

Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 12/24/22 Time: 18:50
Sample: 1 33
Included observations: 33

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
A	0.043485	184.2423	1.585465
P	0.033450	137.7002	1.585465
C	0.451816	128.1376	NA

Sumber: Data olahan *evIEWS* (2022).

Berdasarkan tampilan tabel output *evIEWS* di atas, dapat dilihat bahwa pada semua variabel baik Penyajian Laporan Keuangan (P) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Kota Malang menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan dalam uji ini adalah tidak terjadi gejala atau masalah multikolinearitas.

C. Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melakukan uji white. Tes ini pada dasarnya bekerja dengan menjadikan residual, yang berasal dari persamaan regresi kuadrat dan menggantikan variabel Y dalam model asli, sebagai variabel independen. Sedangkan yang menjadi variabel independennya adalah variabel independen model asal ditambah variabel interaksi antar variabel (perkalian antar variabel) serta kuadrat setiap variabel. Berikut merupakan penentuan hipotesis dan kriteria ujinya dalam prosedur uji white dengan menggunakan *EvIEWS*:

Hipotesis

$H_0 : \sigma^2 = \sigma^2$ (varians adalah sama atau tidak terjadi heteroskedastisitas)

$H_a : \sigma^2 \neq \sigma^2$ (varians adalah tidak sama atau terjadi heteroskedastisitas)

Kriteria Uji

H_0 diterima apabila : Probabilitas $\geq \alpha$ (0,05)

H_0 ditolak apabila : Probabilitas $< \alpha$ (0,05)

Hasil analisis uji heteroskedastisitas tersaji dalam table berikut ini:

Tabel 4. 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.602908	Prob. F(3,29)	0.6184
Obs*R-squared	1.937369	Prob. Chi-Square(3)	0.5855
Scaled explained SS	3.285789	Prob. Chi-Square(3)	0.3496

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/24/22 Time: 18:54

Sample: 1 33

Included observations: 33

Collinear test regressors dropped from specification

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.119804	0.259814	-0.461114	0.6482
A^2	0.133401	0.136991	0.973794	0.3382
A*P	-0.235358	0.282586	-0.832870	0.4117
P^2	0.116056	0.153139	0.757846	0.4547
R-squared	0.058708	Mean dependent var		0.105781
Adjusted R-squared	-0.038667	S.D. dependent var		0.217625
S.E. of regression	0.221793	Akaike info criterion		-0.060934
Sum squared resid	1.426569	Schwarz criterion		0.120461
Log likelihood	5.005407	Hannan-Quinn criter.		0.000100
F-statistic	0.602908	Durbin-Watson stat		1.233717
Prob(F-statistic)	0.618372			

Sumber: Data olahan *eviews* (2022).

Berdasarkan tampilan tabel output spss di atas, dapat dilihat bahwa pada Prob. chi square (2) pada *Obs*R-Squared* yaitu sebesar 0,5855. Oleh karena nilai $0,5855 > 0,05$ maka tidak dideteksi adanya masalah heteroskedastisitas.

1.2 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian dilakukan untuk mendapatkan deskripsi hubungan keterpengaruhan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Kemudian untuk pengujiannya, dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Berikut merupakan hasil analisis uji regresi berganda:

Tabel 4. 6
Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: AK
Method: Least Squares
Date: 12/24/22 Time: 18:49
Sample: 1 33
Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
A	0.529774	0.208531	2.540506	0.0165
P	0.420945	0.182894	2.301580	0.0285
C	0.063655	0.672172	0.094700	0.9252
R-squared	0.499152	Mean dependent var		3.696970
Adjusted R-squared	0.465762	S.D. dependent var		0.466694
S.E. of regression	0.341114	Akaike info criterion		0.773307
Sum squared resid	3.490760	Schwarz criterion		0.909353
Log likelihood	-9.759567	Hannan-Quinn criter.		0.819082
F-statistic	14.94920	Durbin-Watson stat		1.320008
Prob(F-statistic)	0.000031			

Sumber: Data olahan *eviews* (2022).

Pada table 4.6 *-Coefficients* di atas dapat dijelaskan tentang persamaan regresi ganda pada penelitian ini. Adapun rumus persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$AK = \alpha + \beta_1 A + \beta_2 P + \varepsilon$$

$$AK = 0.063655 + 0.529774 A + 0.420945 P$$

Dari persamaan regresi di atas, maka kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a) Nilai konstanta (α) sebesar 0.063655 dengan tanda positif menyatakan bahwa apabila variabel Aksesibilitas (A) dan Penyajian (P) Laporan Keuangan Kota Malang dianggap konstan maka nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang (AK) yaitu 0.063655.
- b) Nilai koefisien regresi variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Kota Malang (A) sebesar 0.529774 dengan tanda positif menyatakan apabila

Aksesibilitas Laporan Keuangan Kota Malang (A) naik satu satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang (AK) akan naik sebesar 0.529774. Artinya, dengan kenaikan aksesibilitas diharapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kota Malang akan lebih akuntabel dan transparan.

- c) Nilai koefisien regresi variabel Penyajian Laporan Keuangan Kota Malang (P) sebesar 0.420945 dengan tanda positif menyatakan apabila jika Penyajian Laporan Keuangan Kota Malang (P) naik satu satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang (AK) akan naik sebesar 0.420945. Artinya, dengan penyajian yang lebih baik diharapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan akan lebih mudah dipahami dan dapat menjadi bahan rujukan keuangan khususnya di lingkungan Kota Malang.

Selanjutnya, dalam Analisis yang dilakukan dalam uji hipotesis meliputi 3 (tiga) pengujian penting yakni Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji statistik F dan Uji statistik t. Dalam uji hipotesis menggunakan aplikasi eviews, hasil analisis ditampilkan dalam satu windows sebagaimana berikut:

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam model regresi penelitian, tujuan koefisien determinasi (R Square) adalah untuk menentukan, dalam satuan persentase, seberapa besar persentase pengaruh variabel independen atau independen terhadap variabel dependen atau dependen. Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa Nilai R-squared dalam penelitian ini sebesar 0.499152. Artinya, variabel independen yaitu Penyajian Laporan Keuangan (P) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Kota Malang secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang (AK) sebesar 49,91%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

b. Uji Statistik F

Uji F digunakan dalam satu penelitian untuk menentukan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara terpisah atau bersamaan.

Penelitian ini akan menggunakan uji F dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Jika P value (Sig) $> \alpha$ maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang tidak dipengaruhi oleh variabel bebas (Independent) secara signifikan.
- Jika P value (Sig) $\leq \alpha$ maka H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas (Independent).

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000031. Artinya, nilai probabilitas F-statistik tersebut lebih kecil daripada nilai signifikansi. Kemudian variabel bebas yaitu Penyajian Laporan Keuangan (P) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (A) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang (AK).

c. Uji Statistik t

Dalam suatu penelitian, uji t pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai Sig dapat menunjukkan bagaimana keputusan diambil saat dilakukan uji t parsial. Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi 5% atau 0,05 dengan kriteria :

- a. Jika P value (Sig) $> \alpha$ maka H_0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap Akuntabilitas Pengelola Keuangan Kota Malang
- b. Jika P value (Sig) $\leq \alpha$ maka H_0 ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap Akuntabilitas Pengelola Keuangan Kota Malang

Berdasarkan tabel 4. di atas, maka pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel Akuntabilitas Pengelola Keuangan Kota Malang adalah:

- ✓ Penyajian Laporan Keuangan (P) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang(AK)

$H_0 : \beta_1 = 0$ artinya P tidak berpengaruh positif terhadap AK

$H_1 : \beta_1 > 0$ artinya P berpengaruh positif signifikan terhadap AK

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah P berpengaruh positif terhadap harga saham AK.

Berdasarkan tabel keluaran tinjauan -Koefisien| di atas, diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel P sebesar 0,0285. Karena nilai Sig. 0,0285 < probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan Ho ditolak. Yang artinya adalah ada pengaruh signifikan antara Penyajian Laporan Keuangan (P) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang(AK).

✓ Aksesibilitas Laporan Keuangan (A) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang(AK)

Ho : $\beta_1 = 0$ artinya A tidak berpengaruh positif terhadap AK

H1 : $\beta_1 > 0$ artinya A berpengaruh positif signifikan terhadap AK

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah A berpengaruh positif terhadap AK.

Berdasarkan tabel keluaran tinjauan -Koefisien| di atas, diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel P sebesar 0,0165. Karena nilai Sig. 0,0165 < probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan H1 diterima dan Ho ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Aksesibilitas Laporan Keuangan (A) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang (AK).

1.3 Pembahasan

4.1.4 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan (A) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang(AK)

Berdasarkan tabel output eviews -Koefisien| di atas, diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel P sebesar 0,0165. Karena nilai Sig. 0,0165 < probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan H1 diterima dan Ho ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan antara Aksesibilitas Laporan Keuangan (A) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang(AK). Hal ini menunjukkan bahwa apabila tingkat Aksesibilitas Laporan Keuangan (A) di Kota Malang semakin baik maka akan membuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (AK) Kota Malang juga semakin akuntabel dan transparan. Dengan perkembangan masa kini yang ditunjang dengan pemanfaatan IT, maka kemudahan aksesibilitas Laporan Keuangan kini menjadi salah satu indikator untuk mengukur peningkatan akuntabilitas Laporan Keuangan Kota Malang.

Hal ini didukung dengan nilai koefisien regresi variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Kota Malang (A) sebesar 0.529774 dengan tanda positif

menyatakan apabila Aksesibilitas Laporan Keuangan Kota Malang (A) naik satu satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang (AK) akan naik sebesar 0.529774. Artinya, variabel aksesibilitas diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kota Malang untuk meningkatkan integritas keuangan Kota Malang.

Hasil analisis ini senada dengan kajian empiris yang disampaikan oleh Peggy Sabde (2013) dan Hayani (2014) yang menyatakan keterpengaruhan positif aksesibilitas terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Dari paparan tersebut diharapkan melalui pemberian fasilitasi kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka akan memungkinkan berjalannya fungsi kontrol yang baik terhadap pertanggungjawaban penggunaan asset Daerah maupun kontrol terhadap kebijakan - kebijakan keuangan yang diambil pemerintah, baik kontrol yang dilakukan oleh badan pemeriksa, masyarakat maupun investor. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah Kota Malang.

4.2.4 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan (P) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang (AK)

Berdasarkan tabel output eviews -Koefisien di atas, diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel P sebesar 0,0285. Karena nilai Sig. $0,0285 < \text{probabilitas } 0,05$ maka dapat disimpulkan H1 diterima dan Ho ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan antara Penyajian Laporan Keuangan (P) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang (AK).

Hal ini didukung dengan nilai koefisien regresi variabel Penyajian Laporan Keuangan Kota Malang (P) sebesar 0.420945 dengan tanda positif menyatakan apabila jika Penyajian Laporan Keuangan Kota Malang (P) naik satu satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang (AK) akan naik sebesar 0.420945. Artinya, dengan penyajian yang lebih baik diharapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan akan lebih mudah dipahami dan dapat menjadi bahan rujukan keuangan khususnya di lingkungan Kota Malang.

Hasil analisis ini senada dengan kajian empiris yang disampaikan oleh Riyansa (2015) dan Nuria Rahma (2017) yang menyatakan keterpengaruhan positif

penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Dari paparan di atas dapat disampaikan bahwa dengan adanya penyajian laporan keuangan yang baik, yang memenuhi karakteristik laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah Kota Malang. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah Daerah sebab semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah Daerah. Maka dari itu, penyajian laporan keuangan yang baik diharapkan dapat mengurangi celah, kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah. Dengan demikian pengelolaan keuangan Daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah Kota Malang.

4.3.4 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan (A) dan Penyajian Laporan Keuangan (P) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang (AK)

Hasil uji simultan atas variabel penyajian laporan keuangan Daerah dan aksesibilitas laporan keuangan Daerah menunjukkan bahwa secara bersama-sama memiliki pengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah. Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000031. Artinya, nilai probabilitas F-statistik tersebut lebih kecil daripada nilai signifikansi. Kemudian variabel bebas yaitu Penyajian Laporan Keuangan (P) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (A) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang (AK). Hasil analisis ini senada dengan kajian empiris yang disampaikan oleh Reni Rafika Sari (2014) dan Nuria Rahma (2017) yang meneliti mengenai hubungan keterepengaruhan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Dengan demikian hasil analisis penelitian ini dapat menunjukkan adanya hubungan simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan Daerah dan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan Daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah. Dalam teorinya Shende dan Bennett mengisyaratkan diperlukannya tiga elemen penting dalam menegakkan reformasi di bidang pemerintahan (khususnya

pengelolaan keuangan Daerah), yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi pada prakteknya, transparansi dan akuntabilitas adalah tidak independen, sebab pada pelaksanaannya akuntabilitas memerlukan transparansi.

Selain itu, dapat disampaikan pula bahwa laporan tahunan (laporan keuangan) dapat dipertimbangkan sebagai media akuntabilitas. Dimana pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemampuan untuk memberikan aksesibilitas, tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada stakeholder adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah (Mardiasmo, 2013).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan (A) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang(AK). Berdasarkan tabel output evIEWS "Coefficients" di atas diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel P adalah sebesar 0,0165. Karena nilai Sig. 0,0165 < probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan H1 diterima dan Ho ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan antara Aksesibilitas Laporan Keuangan (A) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang(AK).
- b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang(AK) Berdasarkan tabel output evIEWS "Coefficients" di atas diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel P adalah sebesar 0,0285. Karena nilai Sig. 0,0285 < probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan H1 diterima dan Ho ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan antara Penyajian Laporan Keuangan (P) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang(AK).
- c. Variabel independen yaitu Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang .

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. BPKPD Kota Malang perlu lebih memperhatikan aksesibilitas sistem pengendalian intern dan laporan keuangannya. Dari perspektif vertikal dan horizontal, tujuannya adalah untuk mempertanggungjawabkan atau menginformasikan semua kegiatan dan laporan manajemen keuangan terkait secara bertanggung jawab.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat memasukkan variabel tambahan seperti penerapan sistem transparansi dan kualitas laporan yang mungkin lebih besar pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan dapat menambah atau mengurangi populasi dan sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Defitri, S. Y. (2018). PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah: Vol. XII (Revisi)*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Jack, D. (2002). Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required. *IMF Working Paper* , 30.
- Juniaswati, K. T., & Murdiansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 118-135.
- Kaiser, H. F., & Rice, J. (1974). Little Jiffy, Mark Iv. *Educational and Psychological Measurement*, 34(1), 111–117. <https://doi.org/10.1177/001316447403400115>
- Mardiasmo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik (Revisi)*. Andi.
- Mulyana, B. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* , 2.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik, edisi 2*. http://slims.umn.ac.id/index.php?p=show_detail&id=691
- Nurhayani, H. (2010). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survei Seluruh Dinas di Pemerintahan Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*, 1–12.
- Rohman, A. (2009). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 9.
- Sande, P. (2013). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat)*.
- Sanjaya, L. (2015). Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 3(1), 35–48. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i1.179>
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* (4th ed., Vol. 2). Salemba Empat.

- Shende, S., & Bennett, T. (2004). *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration* (RAB/01/006: Transparency and Accountability in the Public Sector in the Arab Region, Concept Paper 2).
- Chia. Y. M. (1995). Decentralization, Management Accounting Systems (MAS) Information Characteristic and Their Interaction Effects on Managerial Performance: A Singapore Study, *Journal of Business Finance and Accounting*, Sept: 811-830.
- Diamond, Jack. 2002. Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hariyani. 2014. -Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksebilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern al Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Siak.
- Kaiser. H. F., dan J. Rice. (1974). Little Jiffy, Mark IV, *Educational and Psychological Measurement*. Vol.34, No.1, (Spring) : 111-117.
- Luchman, Sanjaya. 2015. Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo. JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 3, No 1. Universitas Airlangga.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2013, *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mulyana, Budi, 2006, -Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerahl, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol.2 No. 1, Mei 2006.
- Murdiansyah, Isnand dan Wahyuni, Nanik dan Lestari, Yona Octiani . (2021) . *Independensi dan kompetensi auditor pengaruhnya terhadap kualitas audit dengan fee audit sebagai moderasi*. Presented at National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), 6 Apr 2021, Universitas Negeri Malang.

- Murdiansyah, I., Wahyuni, N., & Lestari, Y. O. (2021). Independensi dan kompetensi auditor pengaruhnya terhadap kualitas audit dengan fee audit sebagai moderasi.
- Murdiansyah, I. (2022). Religious Accountant as Fraud Reducer. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 4(1), 113-122.
- Murdiansyah, I., Wahyuni, N., & Lestari, Y. O. (2020). Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Agency Cost terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 6(1)
- Nordiawan, Deddi. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayani, Hani. (2010). -Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survei Seluruh Dinas di Pemerintahan Kota Bandung. || Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia. Hlm. 1-12.
- Rahma, Nuriya. 2017. -Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksebilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- Riyansa. 2015. || Pengaruh Penyajian dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rohman, Abdul, 2009, -Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah ||. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sande, Peggy. (2013). -Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat). || Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Sumatra Utara. Hlm. 1-20
- Sari, Rafika. (2014). -Pengaruh Sistem Pengadaian Internal, Sistem Akutansi Keuangan Daerah dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.
- Sekaran, Uma. (2006). Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

- Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004. Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration. UN DESA.
- Siska, Yulia Defitri. 2018. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Benefita 3(1) Februari 2018 Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon [\(0341\) 558881](tel:0341558881) Faksimile [\(0341\) 558881](tel:0341558881)

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraidah, M.S.A

NIP 197612102009122001

Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : AHMAD HELMY SULAIMAN

NIM : 17520082

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : **PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP ANTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTAMALANG**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
20%	21%	14%	14%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Mei 2023

UP2M



Zuraidah, M.S.A

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Pendidikan : SLTA/ D-3/ S-1/S-2/S-3
5. Pangkat :
6. Lama bekerja..... Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat Anda tentang pernyataan berikut dengan memilih salah satu alternatif jawaban dari pertanyaan dan menandainya dengan tanda centang (✓).

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.				
2.	.Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.				
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi.				

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.				
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.				
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)				
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN.				
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat.				
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.				
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan				

	mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal.				
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.				
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik.				

Lampiran 1. Hasil Kuisisioner Penelitian

Hasil Kuisisioner Penelitian

①

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Tasya
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Usia : 30 th
4. Pendidikan : SLTA/D-3/S-1/S-2/S-3
5. Pangkat : Penata muda
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.			✓	
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan.			✓	
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi.			✓	

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.			✓	
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.			✓	

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.			✓	
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.			✓	
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website).				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power).			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN.				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat.			✓	
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.				
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal.				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.			✓	
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik.				✓

(2)

Kuisisioner Penelitian**A. IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama : Eni
2. Jenis Kelamin : Petempuan
3. Usia : 35 th
4. Pendidikan : SLTA/D-3/S-1/S-2/S-3
5. Pangkat : Pengajar TK-1
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG**1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah**

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.			✓	
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.			✓	
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan		✓		
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi.			✓	

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur			✓	
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.		✓		
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna			✓	

2. Aksesibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.			✓	
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.			✓	
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)		✓		

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN			✓	
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat.			✓	
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.			✓	
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.		✓		
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal.		✓		
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.		✓		
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik		✓		

3

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Nabilah Dewi
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Usia : 41
4. Pendidikan : SLTA/D-3/S-1/S-2/S-3
5. Pangkat : Penata Muda
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.			✓	
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan			✓	
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi.				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.			✓	
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.			✓	

2. Aksebilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisiener	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.			✓	
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.			✓	
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisiener	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)		✗	✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN.			✓	
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat.			✓	
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.			✓	
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal.			✓	
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.			✓	
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik.			✓	

4

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Muhammed Anas
2. Jenis Kelamin : Laki - Laki
3. Usia : 28
4. Pendidikan : SLTA/D-3 (S-1/S-2/S-3)
5. Pangkat : Penata Muda Tk. 1
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.			✓	
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi			✓	

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.			✓	
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.			✓	
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)		✓		
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN.			✓	
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat.			✓	
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.		✓		
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.		✓		
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.			✓	
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal.			✓	
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.			✓	
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik			✓	

5

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Dian Angki
2. Jenis Kelamin : laki-laki
3. Usia : 29 tahun
4. Pendidikan : SLTA/D-3/S-1/S-2/S-3
5. Pangkat : Penata Muda
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi.				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.				✓
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisiomer	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisiomer	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)				✓
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN.				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat.				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.				✓
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal.				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

(4)

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Andi Pratomo
2. Jenis Kelamin : Laki - Laki
3. Usia : 30 Tahun
4. Pendidikan : SLTA/D-3/S-1/S-2/S-3
5. Pangkat : Ponata Muda Tk. I
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali				✓
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)				✓
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat.				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat				✓
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Ahmad Wildan
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Usia : 28
4. Pendidikan : SLTA/D-3/S-2/S-3
5. Pangkat : Pegawai Madya Tingkat II
6. Lama bekerja : 3 Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu			✓	
2	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini				✓
3	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi			✓	

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur			✓	
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali				✓
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah			✓	
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)				✓
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN			✓	
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat			✓	
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat				✓
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik		✓		

8

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : ALFIAN PRATAMA
2. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
3. Usia : 30
4. Pendidikan : SLTA/D-3/S-1/S-2/S-3
5. Pangkat : PENGATUK TK.1
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan.				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi.				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur			✓	
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali				✓
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah			✓	
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)				✓
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN			✓	
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat			✓	
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat				✓
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik		✓		

(9)

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Ida Winarti
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Usia : 51
4. Pendidikan : SLTA/D-3/S-1/S-2/S-3
5. Pangkat : Penata Muda
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur			✓	
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali				✓
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah			✓	
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)				✓
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN			✓	
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat			✓	
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat				✓
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik		✓		

60

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Ahmad Ramadhan
2. Jenis Kelamin : Idn-Idn
3. Usia : 29
4. Pendidikan : SLTA/ D-3/ S-1/ S-2/ S-3
5. Pangkat : Pengajar Tk.1
6. Lama bekerja : 3 Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini			✓	
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat.				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

11

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Fen Maisarah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Usia : 55
4. Pendidikan : SLTA/D-3/S-2/S-3
5. Pangkat : Penata Muda Tk. 1
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

- 1 Nama : Ita Risa
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Usia : 40
- 4 Pendidikan : SLTA/ D-3 (S-1)/S-2/S-3
- 5 Pangkat : Penata Muda
- 6 Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS Sangat Setuju

S Setuju

TS Tidak Setuju

STS Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat.				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

13

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Herry Wigayanti
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Usia : 50
4. Pendidikan : SLTA D-3/ S-1/S-2/S-3
5. Pangkat : Penata
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat.				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

(14)

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Emmie Pistanthen
2. Jenis Kelamin : perempuan
3. Usia : SS
4. Pendidikan : SLTA/ D-3/ S-1 (S-2) S-3
5. Pangkat : Pembina
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat.				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓



Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Elisa Dian Fatmawati
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Usia : 36
4. Pendidikan : SLTA/D-3/S-1/S-2/S-3
5. Pangkat : Penata Muda Tk. 1
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat.				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

(16)

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Iwan Yulianto
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Usia : 43
4. Pendidikan : SLTA D-3/ S-1/S-2/S-3
5. Pangkat : Pengajar Muda Tk. 1
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Aksesibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Karishma Yvanita
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Usia : 36
4. Pendidikan : SLTA/D-3/ S-1/S-2/S-3
5. Pangkat : Pengantar Tk 1
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.				
2	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini				
3	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				
4	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

(19)

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Mohammad Imron
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Usia : 42
4. Pendidikan : SLTA/D-3 S-1/S-2/S-3
5. Pangkat : Penata Muda Tk. 1
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Aksesibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

16

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Mohammad Saiful Anif
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Usia : 36
4. Pendidikan : SLTA/ D-3/ (S-1) S-2/S-3
5. Pangkat : Penata Muda Tk. 1
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

- SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat.				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

(20)

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Muhammad Lutfi
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Usia : 43
4. Pendidikan : SLTA/D-3/ S-1/S-2/S-3
5. Pangkat : Pengatur Tk. 1
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan.				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi.				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

21

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Muhammad Nur Arsyah
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Usia : 42
4. Pendidikan : SLTA/D-3/ S-1/S-2/S-3
5. Pangkat : Penata
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

(21)

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Satria Yudha Prabowo
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Usia : 31
4. Pendidikan : SLTA/D-3/(S-1)S-2/S-3
5. Pangkat : Pemata Muda Tk. 1
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu			✓	✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini			✓	✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat.				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Nurul Hayati
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Usia : 36
4. Pendidikan : SLTA/ D-3/ S-1/S-2/S-3
5. Pangkat : Penata Muda Tk. 1
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Aksebilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat.				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

Kuisisioner Penelitian

24

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Panibudi Cahur W. Tanjono
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Usia : 43
4. Pendidikan : SLTA/ D-3/ S-1 S-2/S-3
5. Pangkat : Pemata Tk. 1
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.				✓
2.	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini				✓
3.	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				✓
4.	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				✓

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat.				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

25

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Sahilda Suabawani
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Usia : 35
4. Pendidikan : SLTA/ D-3/ S-1/ S-2/ S-3
5. Pangkat : Penata
6. Lama bekerja : Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu				
2	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini				
3	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan				
4	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi				

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Aksesibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓

Kuisisioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

- 1 Nama *Dennis Iwananq Ushah*
- 2 Jenis Kelamin *Petempuan*
- 3 Usia *42*
- 4 Pendidikan *SLTA D-3 S-1 S-2 S-3*
- 5 Pangkat *Pemata Muda*
- 6 Lama bekerja *Tahun*

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

Keterangan:

SS Sangat Setuju

S Setuju

TS Tidak Setuju

STS Sangat Tidak Setuju

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan termakasih

C. DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA LANGSUNG

1. Kuisisioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1	Laporan Keuangan daerah memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu			✓	
2	Laporan Keuangan daerah digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini			✓	
3	Laporan Keuangan daerah selalu disajikan tepat waktu guna membantu dalam pengambilan keputusan			✓	
4	Laporan Keuangan daerah disajikan secara lengkap yakni mencakup semua informasi akuntansi			✓	

5.	Laporan Keuangan daerah menyajikan semua transaksi serta peristiwa lainnya secara wajar dan jujur.				✓
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat diuji, serta menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh walaupun pengujian dilakukan lebih dari 1 kali.			✓	
7.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna.				✓

2. Akseibilitas Laporan Keuangan

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa				✓
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.				✓
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)				✓

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item Kuisisioner	STS	TS	S	SS
1.	Terselenggaranya praktik pemerintah yang sehat serta adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)			✓	
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain serta adanya penghindaran terhadap KKN				✓
3.	Adanya pertanggungjawaban anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara benar, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat				✓
4.	Adanya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, serta dengan biaya yang murah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat			✓	
5.	Pengalokasian anggaran dilakukan secara konsisten mengikuti proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.				✓
6.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.				✓
7.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa anggaran tersebut dapat menghasilkan output maksimal				✓
8.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat				✓
9.	Program/ kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, bahwa penggunaan anggaran mencapai target, tujuan atau kepentingan publik				✓